

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA**

Disusun Oleh :

Ayuh Jeliana Agian Tiballa'

4519012078



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023


HALAMAN PENGESAHAN

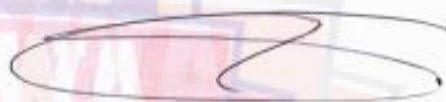
Judul : Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara
Nama Mahasiswa : Ayuh Jeliana Agian Tiballa'
Stambuk/NIM : 4519012078
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si


Dr. Chahyono, SE., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Manajemen


Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM


Ahmad Jumarting, SE., MM

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayuh Jeliana Agian Tiballa'
NIM : 4519012078
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Judul : Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 06 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Ayuh Jeliana Agian Tiballa'

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara**” ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat banyak sekali bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu memberkati, menyertai, melindungi, menunjukkan jalan yang terbaik dan memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada penulis dalam menulis skripsi ini. Sebagai tempat mengadu dan memohon pertolongan untuk segala sesuatu serta masih banyak hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, perhatian, motivasi, bimbingan, dan doa dengan sabar.
3. Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan selama kurang lebih empat tahun di Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Herminawati Abubakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Indrayani Nur, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Satu yang telah banyak memberi arahan dan pembelajaran selama perkuliahan.

6. Ahmad Jumarding, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Cahyono S.E., M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Bapak Matus Sampelalong, S.E., M.Si dan jajarannya yang telah mengizinkan dan mendukung penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian studi.
11. Sahabat-sahabat yang selalu berada di samping penulis, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
12. Segenap keluarga besar yang telah mendukung dalam proses penyelesaian studi.
13. Teman-teman seperjuangan, Manajemen 2019, yang telah berjuang bersama dan saling mendukung dari awal semester.

14. Semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Untuk diri sendiri yang selalu kuat, sabar dan berhasil melawan ego serta rasa malas untuk terus berjuang demi masa depan yang cerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Apabila terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini mejadi lebih baik kedepannya.

Makassar, 06 Juni 2023

Ayuh Jeliana Agian Tiballa'

ABSTRAK

AYUH J. AGIAN TIBALLA'. Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si dan Dr. Chahyono, SE., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara masih kurang baik. Seperti pada analisis menggunakan rasio efektivitas mendapatkan hasil sebesar 68,5%, dimana tergolong tidak efektif karena kurang dari 100%. Pada analisis menggunakan rasio efisiensi mendapatkan hasil sebesar 498,25%, dimana tergolong tidak efisien karena lebih dari 100%. Pada analisis menggunakan rasio pertumbuhan, rasio pertumbuhan realisasi pendapatan mendapatkan hasil sebesar 23%, dimana tergolong kedalam pertumbuhan sedang. Sedangkan pada rasio pertumbuhan realisasi belanja mendapatkan hasil sebesar 1%, dimana tergolong kedalam pertumbuhan sangat rendah.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan

ABSTRACT

AYUH J. AGIAN TIBALLA'. Analysis of the Financial Report of the Department of Culture and Tourism of North Toraja Regency. Based on the Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio at the Department of Culture and Tourism of North Toraja Regency. (Supervised by Dr. Thamrin Abduh, SE., M.Si and Dr. Chahyono, SE., M.Si).

This study aims to determine financial performance based on effectiveness ratio, efficiency ratios and growth ratios at the Department of Culture and Tourism of North Toraja Regency. The data processed is the 2019-2022 Department of Culture and Tourism of North Toraja Regency realization and expenditure budget report.

The result of this study indicate that financial performance of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office is still not good. As in the analysis using the effectiveness ratio to get result of 68,5%, which is classified as ineffective because it is less than 100%. In the analysis using the efficiency ratio to get a result of 498,25% which is classified as inefficient because it is more than 100%. In analysis using the growth ratio, the growth ratio of realized income yields a result of 23% which is classified as moderate growth. Meanwhile, the growth ratio for expenditure realization yielded a yield of 1%, which is classified as very low growth.

Keyword: Financial Report, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios, Growth Ratios.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Deskripsi Teori	9
1. Pengertian Pariwisata	9
2. Pengertian Manajemen Keuangan	10
3. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuangan	11
4. Laporan Keuangan	13
5. Tujuan Laporan Keuangan	15
6. Komponen Laporan Keuangan	17
7. Analisis Rasio Keuangan	25
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	32
D. Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN ..	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	35
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	38
1. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	38
2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	38
3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.....	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	42
1. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	42
2. Rasio Efektivitas	42
3. Rasio Efisiensi	44
4. Rasio Pertumbuhan	45
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022.....	3
Tabel 1.2	Laporan Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2022	42
Tabel 4.2	Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022	44
Tabel 4.3	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022	46
Tabel 4.4	Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1) Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian.....	54
2) Surat Rekomendasi.....	55
3) Lembar Disposisi	56
4) Laporan Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022	57
5) Laporan Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen keuangan adalah pencatatan dimana mencakup keseluruhan aktivitas organisasi untuk mengurus urusan dana dengan cara efektif dan efisien (Samsurijal Hasan dkk, 2022:1). Pengelolaan dana dapat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian keuangan serta pengendalian dana (Purba *et al.*, (2021:114).

Manajemen keuangan yang baik perlu diterapkan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah yang bergerak di bidang usaha agar usaha yang dijalankan mampu berkembang terutama pada bidang keuangannya. Terdapat banyak sekali usaha yang dijalankan oleh pemerintah yang mampu meningkatkan pendapatan negara, salah satunya adalah pariwisata dengan potensi besar yang dimiliki yang dikelola pada setiap daerah.

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat meningkatkan devisa negara. Pembangunan destinasi pariwisata yang semakin berkembang mampu mendorong peningkatan pendapatan negara. Keberagaman Sumber Daya Alam (SDA), keindahan alam, iklim, flora dan fauna yang kas, dan hutan rimba yang lebat. Selain itu, pada saat ini situs wisata budaya lokal seperti peninggalan sejarah, adat istiadat, upacara keagamaan, kesenian, tata hidup masyarakat, kerajinan rakyat dan lain-lain menjadi daya tarik banyak wisatawan. (Damardjati, 1989:19).

Peningkatan jumlah wisatawan dapat dilakukan dengan meningkatkan daya tarik pariwisata sehingga pendapatan daerah dan berbagai manfaat untuk masyarakat juga dapat ikut meningkat. (Paturusi, 2001).

Kabupaten Toraja Utara, dengan ibukotanya Rantepao, terkenal dengan keindahan alamnya dan budaya peninggalan nenek moyang yang masih hidup. Budaya yang menjadi salah satu kebanggaan daerah Toraja menjadi perhatian penting karena telah dilakukan sejak nenek moyang dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Salah satu dari budaya tersebut adalah ritual Rambu Solo' yang menjadi perhatian dunia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan undang-undang. Undang-undang tersebut telah memberikan wewenang kepada pemerintah sebagai pengatur keuangan agar dapat diatur dengan seadil-adilnya menurut ketentuan undang-undang.

Sebagai pengelola, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara bertanggung jawab mengelola dan meningkatkan pesona pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Dengan mengelola dan meningkatkan kunjungan wisatawan, organisasi ini memiliki peran besar dalam meningkatkan PAD.

Namun, saat pandemi Covid-19 yang menuntut untuk membatasi mobilisasi membuat pengunjung yang datang berwisata menurun drastis sehingga mempengaruhi pendapatan daerah sektor pariwisata. Untuk menarik kembali wisatawan, pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk mengembangkan dan membangun pariwisata.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pedoman Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022, pemerintah memberikan dana yang dikhususkan setiap tahun untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Terdapat Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun yang dikhususkan untuk sektor budaya dan pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Dana Alokasi Khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019-2022 yang telah dianggarkan terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laporan Dana Alokasi Khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022

Tahun	Total Dana Alokasi Khusus (DAK)
2019	Rp2.341.368.000
2020	Rp4.509.862.000
2021	Rp7.865.863.393
2022	Rp1.650.709.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (2022)

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari dua bagian: DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Menurut Pasal 26 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik berasal dari APBN diperuntukkan sebagai pembiayaan kegiatan khusus fisik yang sesuai dengan prioritas nasional.

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur cara penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Tujuan dari DAK ini adalah untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif (Permenparekraf) Pasal 2 ayat (2) tentang pengelolaan DAK Non Fisik dimaksudkan untuk kegiatan yang mencakup :

1. Meningkatkan tata kelola, keamanan, pelayanan, kebersihan, keselamatan serta keamanan destinasi wisata.
2. Meningkatkan pelaku usaha pariwisata dalam industri pariwisata.
3. Dukungan untuk operasional fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

Selain itu, pengelolaan DAK Non Fisik juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pada bidang kepariwisataan berupa pelatihan-pelatihan agar dapat memberikan pelayanan terbaik serta pengalaman yang menarik bagi para wisatawan.

Manajemen sebuah organisasi baik itu yang berorientasi profit maupun nonprofit selalu diperhadapkan dengan situasi pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. baik maupun tidaknya keputusan tersebut tergantung pada informasi yang digunakan dan kemampuan dalam menganalisisnya. Salah satu sumber penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan harus selaras dengan peraturan yang disajikan secara berkala yang menunjukkan pertanggungjawaban akan keuangan yang dikelola selama periode tertentu. Laporan keuangan kemudian dianalisis sebagai penilaian kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. Setiap sumber pendapatan negara perlu dikelola dan diperiksa dengan baik dan bertanggung jawab yang dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah disusun.

Hak dan kewajiban pemerintah dalam memajukan detiap destinasi wisata di Indonesia kemudian direalisasikan dalam rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk anggaran yaitu pendapatan dan pengeluaran dengan harapan dapat memenuhi tujuan. Anggaran merupakan alat perencanaan dan alat pengawasan pada bidang keuangan yang digunakan pada perusahaan/instansi yang berorientasi pada profit maupun nonprofit. Dengan menggunakan anggaran, maka sebuah perusahaan/instansi akan dapat dipelajari dengan teliti apakah dalam Perusahaan/instansi terdapat dukungan aktif dari tingkat atas maupun bawah. Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022 ditunjukkan pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Laporan Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022

Periode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
2019	PAD	3.076.000.000	3.170.305.000	103,06%
	DAK	2.341.368.000	2.322.821.470	99,20%
	Belanja	11,683,137,807	10,285,232,363	88,03%
2020	PAD	3.076.000.000	1.030.775.000	33,51%
	DAK	4.509.862.000	4.203.674.500	93,21%
	Belanja	10,799,081,810	7,244,583,521	67,08%
2021	PAD	3.076.000.000	1.763.550.000	57,33%
	DAK	7.865.863.392	7.720.180.917	98,14%
	Belanja	13,012,612,525	12,781,567,158	98,22%
2022	PAD	3.650.000.000	2.908.915.000	79,70%
	DAK	1.650.709.000	1.423.559.200	86,23%
	Belanja	8,570,432,086	7,001,320,549	81,69%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan pendapatan paling signifikan terdapat pada tahun 2020. Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didominasi oleh pendapatan transfer sedangkan pendapatan asli daerah masih cenderung sedikit. Kemudian dari segi belanja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membelanjakan jumlah uang yang cukup besar. Realisasi anggaran turun pada periode 2020, naik pada periode 2021, tetapi kembali turun pada periode 2022

Menganalisis laporan keuangan adalah cara penting untuk mendapatkan informasi tentang keuangan. Rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.

Dari penjelasan diatas, maka diketahui bahwa agar dapat dipertanggungjawabkan pada akhir periode jabatan, pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan baik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara. Sehingga, penulis tertarik mengangkat judul **Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas yaitu “apakah kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022 tergolong baik?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Manajemen.

2. Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Civitas Akademika

Universitas Bosowa, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain..

E. Lingkup Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memakai dua sumber data yakni primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, penulis memakai batasan pada masalah dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dan beberapa sub bab, pada setiap bab dan sub bab berisikan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini. Kemudian dibahas rumusan masalah, yang merupakan pokok penelitian ini. Terakhir, tujuan dan manfaat dari penelitian ini untuk penulis dan orang lain.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, memuat kajian teori yang memuat teori-teori yang sesuai untuk memprediksi fenomena yang menjadi topik yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pikir yang berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan untuk masing-masing variabel, dan hipotesis berisi mengenai bagaimana hasil penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat waktu dan tempat penelitian, jenis data yang dikumpulkan dan sumbernya, metode pengumpulan dan analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat pembahasan mengenai hasil penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai seluruh pembahasan pada penelitian ini serta saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dan juga kepada peneliti lain.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata umumnya adalah kumpulan orang atau individu yang melakukan kunjungan dari satu tempat menuju tempat lain untuk sementara waktu dengan maksud menikmati perjalanan dan bersantai dari tekanan pekerjaan.

Kodhiat (1998) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud jangka pendek untuk mencapai kebahagiaan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Menurut Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai perjalan singkat dari suatu tempat ke tempat lain, baik karena kepentingan agama, budaya, ekonomi, social, politik, kesehatan maupun kepentingan lainnya.

Menurut World Tourism Organization (WTO), pariwisata didefinisikan sebagai tindakan manusia, seperti bepergian dan menginap di lokasi di luar rutinitas. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan perjalanan di mana satu orang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan hiburan, pengembangan diri, maupun menggali kekhasan tempat tersebut.

Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu daerah yang mempunyai daya tarik wisata karena kebudayaan, sejarah dan keindahan alamnya. Toraja merupakan tujuan wisata bagi mereka yang mencari suasana tenang, lingkungan alam yang unik dengan lansekap persawahan dan bebatuan besar serta rumah adat dengan berbagai aspek budaya seperti lumbung padi alang,

pelambaran, rante, sumur, dan liang kuburan (Myra Gunawan dkk., 2016). Toraja dan destinasinya adalah satu-satunya yang menggambarkan fundamental Asia Tenggara. Selain itu, generasi Toraja telah melestarikan berbagai bentuk budayanya, yang dapat dilihat dalam budaya *rambu tuka* dan *rambu solo*. (Eric Crystal, 1970).

2. Pengertian Manajemen Keuangan

Dalam operasional bisnis, untuk keperluan operasi yang lebih efektif dan efisien, manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana yang diperlukan. (Joseph Massie).

Dalam membahas dan menganalisis bagaimana para pemimpin menggunakan semua sumber daya perusahaan untuk mewujudkan keuntungan finansial yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan, manajemen keuangan menggabungkan teori dan seni (Fahmi, 2013).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003), pengelolaan keuangan mencakup semua proses yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, seperti pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Agus Sartono (2015:6) menyatakan bahwa pengelolaan dana yang efektif dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. Membagi dana ke berbagai jenis investasi.
- b. Pembiayaan investasi atau pengumpulan dana yang efektif.

Manajemen Keuangan, menurut Bambang Riyanto, adalah proses mendapatkan keuntungan dan menggunakannya dengan sistem yang paling efisien dengan biaya yang paling rendah.

Dalam usaha mencapai tujuan keuangan perusahaan, manajemen keuangan adalah proses mengelola keuangan perusahaan dengan meminimalkan pengeluaran dan upaya pengelolaan.

Setelah mendapatkan sumber dana, manajemen keuangan menentukan keputusan tertentu kemudian menggunakan sumber dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional, membayar kewajiban, dan investasi dalam bentuk aset lalu dikelola sehingga dapat mendukung kegiatan usaha.

Untuk membiayai operasi dan investasi, manajemen keuangan pemerintahan mengacu pada pengelolaan dana. Karena dana itu mahal dan memerlukan peran organisasi yang baik, koordinasi, pengarahan, dan evaluasi yang baik untuk mewujudkan *good governance*, sangat penting untuk menjadi efektif dan efisien. (Sumarsono, 2010)

3. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bertujuan untuk membantu manajer perusahaan dalam membuat keputusan.

Kemudian fungsi manajer keuangan sebagai berikut :

- a. Seorang manajer keuangan tidak bisa menjamin keuntungan yang akan di dapatkan dalam jangka pendek maupun panjang, namun manajer dapat memaksimalkan keuntungan dimana manajemen keuangan perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimal kemudian mengalokasikan keuangan perusahaan atau organisasi dengan tepat.
- b. Mempersiapkan struktur modal perusahaan atau organisasi.

- c. Menjaga arus kas yang beroperasi dengan baik. Kesuksesan perusahaan atau organisasi akan meningkat dengan arus kas yang berjalan dengan baik.
- d. Manajemen keuangan dituntut untuk mampu membagi anggaran se-efisien mungkin, dimana mengalokasikan anggaran ke semua bagian.
- e. Manajer keuangan harus melakukan sesuatu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian perusahaan.
- f. Manajer keuangan harus waspada saat mengambil keputusan keuangan karena kelangsungan hidup perusahaan harus tetap bertahan. Salah sedikit saat mengambil keputusan akan membuat perusahaan menjadi rugi atau bahkan bangkrut.

Selain pada perusahaan, manajemen keuangan pada pemerintah juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan negara. Ada 5 (lima) siklus utama yang harus diikuti:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah siklus pertama yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk membuat konsep pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek.

2) Penganggaran

Perencanaan dan dana pemerintah menurut APBN/APBD terhubung dalam penganggaran.

3) Pelaksana Anggaran

Pelaksanaan anggaran tercermin dalam penggunaan pendapatan dan belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan.

4) Pengawasan

Pelaksanaan APBN/APBD dikendalikan oleh pengawas di lingkungannya sendiri.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah cara untuk memenuhi mandat dan memberikan bukti upaya pembangunan pemerintah.

4. Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7), laporan keuangan adalah laporan yang mengungkapkan keadaan saat ini (neraca) dan laba rugi pada waktu tertentu. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait yang membutuhkannya.

Sebaliknya, Munawir mengatakan bahwa laporan keuangan berisi informasi tentang hasil perusahaan, jadi diharapkan bahwa laporan keuangan akan menolong pengguna membuat pertimbangan mengenai keuangan.

Laporan keuangan sangat penting selama proses pengambilan keputusan karena dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuannya dan menentukan perencanaan di masa depan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dipakai sebagai media untuk menilai sumber daya ekonomi. Ini digunakan untuk melihat dan menilai kegiatan operasional pemerintah, kondisi keuangan, efisiensi dan efektivitas laporan, dan sebagai penunjang terhadap kepatuhan akan hukum dan peraturan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan harus memenuhi 4 (empat) standar kualitas, yaitu:

1) Relevan

Data keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin untuk mencegah kesalahan dalam pemanfaatan informasi; laporan keuangan yang relevan memungkinkan untuk mengoreksi perkiraan sebelumnya dan memberikan manfaat nilai prediktif yang dapat membantu dalam memprediksi masa depan dan dapat dipaparkan tepat waktu sehingga dapat membantu pengambilan keputusan.

2) Andal

Laporan keuangan dianggap andal jika terdiri dari informasi yang jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diuji yang, ketika diuji oleh berbagai pihak, menghasilkan hasil yang sama.

3) Dapat Dibandingkan

Untuk memenuhi standar, sebuah entitas dapat memeriksa laporan keuangan dari periode sebelumnya dengan cara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilaksanakan jika entitas memiliki kebijakan akuntansi tahunan yang sama, sedangkan perbandingan eksternal dapat dilaksanakan jika entitas memiliki kebijakan akuntansi tahunan yang sama.

4) Dapat Dipahami

Laporan yang ditulis harus dapat dipahami dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pengguna.

5. Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2011:276) menyatakan bahwa maksud dari penyajian laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, saldo anggaran, arus kas, realisasi anggaran, posisi keuangan, dan perubahan ekonomi ekuitas entitas pelaporan. Hal ini sangat membantu dalam proses membuat keputusan dan evaluasi keputusan sumber daya bagi pengguna.

Setiap laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan semua kegiatan perpindahan dana yang terjadi selama periode tertentu. Setelah periode tersebut berakhir, setiap laporan harus mencatat upaya yang telah dilakukan untuk membuat peningkatan pada akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.

Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan pertanggungjawaban untuk keuangan negara, tetapi juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan, menilai nilai sumber daya yang dipakai untuk menjalankan kegiatan operasional, dan pengevaluasian efisiensi dan efektivitas laporan.

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi tentang bagaimana sumber daya keuangan dikumpulkan, dialokasikan, dan digunakan, serta hasil yang dicapai. Laporan juga menunjukkan seberapa baik posisi keuangan suatu entitas meningkat atau menurun sebagai hasil dari tindakan yang telah dijalankan.

Pada periode pelaporan, setiap entitas pelaporan harus melaporkan upaya yang telah dikerjakan dan hasil yang dicapai secara sistematis dan terorganisir untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya untuk menggapai tujuan yang ditetapkan kepada unit pelaporan.

2) Manajemen

Evaluasi kinerja tindakan entitas pelapor selama periode pelaporan untuk membantu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kebutuhan umum.

3) Transparansi

Dengan menyampaikan informasi yang terbuka dan jujur, publik berhak untuk mengetahui secara penuh tentang tanggung jawab pemerintah untuk mematuhi peraturan dan mengelola sumber daya yang diberikan kepadanya..

4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)

Dalam menentukan pendapatan selama periode pelaporan memadai untuk membiayai semua biaya yang ditargetkan dan kemungkinan bagi generasi berikutnya untuk berbagi akan biaya ini.

5) Evaluasi Kinerja

Untuk sebagian besar, evaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan pemakaian sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pemerintah harus transparan dalam hal manajemen sumber daya, perumusan rencana, dan pelaksanaan programnya. Akibatnya, orang dapat menilai sumber daya yang dimiliki pemerintah dengan melihat laporan keuangan pemerintah, karena mereka memaparkan informasi keuangan yang

jujur dan terbuka kepada publik, sehingga orang dapat mengetahui bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya.

6. Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah paling sedikit terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran memaparkan jumlah sumber daya pemerintah, cara mereka dialokasikan, dan digunakan, serta pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran dibuat untuk memberikan informasi tentang anggaran dan realisasinya sehingga ada hubungan antara anggaran dan realisasinya. Catatan laporan keuangan kemudian menjelaskan beragam faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran.

2) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang dimana kewajiban, ekuitas, dan aset disajikan didalamnya pada tanggal tertentu.

a. Aset

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset dapat dikatakan sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak dari peristiwa yang terjadi di masa lalu dan sumber pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial di masa mendatang. masa depan yang diprediksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau yang berawal dari perolehan lain yang sah dianggap sebagai harta kekayaan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menetapkan bahwa suatu benda yang sah yang berasal dari perolehan lain hanya dapat berasal dari 4 (empat) hal berikut:

- a) Benda yang berasal dari hibah atau barang sejenisnya;
- b) Benda yang berasal dari kesepakatan jual beli;
- c) Benda yang diperoleh berdasarkan ketentuan hukum;
- d) Benda yang diperoleh melalui keputusan pengadilan yang memiliki otoritas tetap.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan aset adalah suatu materi yang memiliki modal, nilai tukar, atau kekayaan. Dalam pengelolaan aset, pemerintah berkonsentrasi pada pelayanan umum yang efisien dan penggunaan sumber daya yang efektif. Aset berharga harus disimpan sehingga dapat bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya, seperti pemerintah dan masyarakat umum.

b. Kewajiban

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kewajiban, Hutang, atau Hutang, Lampiran I PSAP Nomor 09 adalah kejadian masa lalu yang menyebabkan kehilangan sumber ekonomi pemerintah daerah.

Jika pinjaman dilakukan dari pihak ketiga dan bersifat mengikat, kewajiban dapat terbentuk. Kewajiban dapat dikategorikan menjadi 2

(dua) kategori berdasarkan waktu jatuh temponya (PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban):

a) Kewajiban Jangka Panjang

kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo dari dua belas bulan dari tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban mungkin dianggap sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Dalam tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Entitas membayar kembali beban jangka panjang.
- 3) Menjadwalkan kembali syarat pelunasan yang terjadi sebelum laporan keuangan diabsahkan atau tujuan pembayaran didukung oleh kesepakatan penyelesaian.

b) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang wajib dilunasi dalam tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan, juga utang bunga, utang karyawan, dan utang lainnya. Utang transfer pemerintah, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, dan porsi utang jangka panjang termasuk dalam perhitungan pihak ketiga (PFK).

Pencatatan kewajiban pemerintah daerah dilakukan berdasarkan nilai nominalnya. Jika nilainya dalam bentuk mata uang asing, mereka akan dicatat dan dikonversi ke dalam rupiah dengan memakai kurs rata-rata bank sentral..

c. Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah, juga dikenal sebagai ekuitas, adalah jumlah aset dan kewajiban pemerintah. Ada tiga kategori ekuitas, yaitu:

a. Ekuitas Dana Lancar

Dana saat ini memiliki empat komponen ekuitas, terdiri dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek:

1. Sisa Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
2. Cadangan Piutang Usaha.
3. Cadangan Persediaan.
4. Dana yang harus disiapkan untuk pembayaran jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Setelah dikurangi kewajiban jangka panjang, aset pemerintah, aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya dijelaskan dalam dana investasi ekuitas. Ada tiga kategori aset yang termasuk dalam dana investasi, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang.
2. Investasi dalam Aktiva Tetap.
3. Investasi pada Aset Lain (kecuali dana cadangan).
4. Penyediaan dana untuk pelunasan jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan terdiri dari aset pemerintah yang dimiliki sesuai dengan undang-undang untuk tujuan tertentu. Ini terdiri dari:

1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

a. Laporan Arus Kas (LAK)

Tanjung (2009:238) menyatakan bahwa laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran sejumlah dana serta saldo dan setara kas selama satu periode pada tanggal pelaporan. Sedangkan Suhayati dan Anggadini (2009:15) menyatakan bahwa laporan arus kas harus menunjukkan total dana yang digunakan untuk pembiayaan usaha.

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena memperlihatkan pergerakan kas masuk dan keluar serta disajikan dalam kurun waktu tertentu. Ini membantu manajemen merencanakan pembiayaan masa depan dan menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Skousen (2009) dalam (Klaunang, 2013) laporan arus kas harus dilaporkan dalam jangka waktu tertentu dan dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dan keluar adalah sumber utama penerimaan perusahaan. Arus kas masuk termasuk kas klien, piutang bunga, dividen investasi, dan dana pemasok. Arus kas keluar termasuk utang bunga, pajak penghasilan, gaji, dan komisi.

2. Aktivitas Investasi

Jenis arus kas yang tercatat dalam kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Arus kas masuk atau yang diperoleh dari penjualan aktiva, penjualan sekuritas investasi, dan perolehan pinjaman;
- b. Arus kas keluar atau pengeluaran untuk membeli aset, investasi jangka panjang pada efek ekuitas utang, pinjaman kepada pihak lain, dan akuisisi aset; dan
- c. Arus kas keluar atau pembayaran untuk pembelian aset.

3. Aktivitas Pendanaan

Proses ini mengubah modal pinjaman perusahaan. Dua jenis aktivitas pendanaan terdiri dari arus kas yang biasanya tidak masuk:

- a. Penyediaan arus kas masuk oleh pemegang yang menerbitkan efek ekuitas dan kreditur untuk menerbitkan efek hutang;
- b. Memberikan dana kepada pemegang dividen dan pembayaran tambahan; memungkinkan pemilik untuk melepaskan saham mereka; dan memfasilitasi kreditur untuk membayar pinjaman..

b. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sinaga (2011) mengatakan catatan atas laporan keuangan perlu memberikan pemahaman rinci tentang anggaran penting

selama periode tersebut, yang harus ditemukan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. IAI (2004) juga mengatakan bahwa penyajian catatan atas laporan keuangan wajib cermat.

Catatan atas Laporan Keuangan menolong pengguna memahami laporan keuangan secara luas dan menghindari kesalahpahaman akuntansi akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup data yang memadai tentang pos-pos laporan keuangan, termasuk:

- 1) Menampilkan informasi tentang strategi keuangan daerah, pencapaian target dalam Perda APBD serta halangan dan kendala dalam mencapainya.
- 2) Menampilkan hasil kerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Memberikan laporan tentang dasar pembentukan laporan keuangan dan ketatanegaraan lainnya.
- 4) Memberikan laporan yang dibutuhkan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi yang belum diselesaikan.
- 5) Berikan informasi tambahan sesuai kebutuhan.

3) Laporan Arus Kas (LAK)

Menurut Kieso dan Weygandt (2011:21-24), laporan arus kas adalah laporan utama yang mengungkapkan aktivitas investasi, operasi, dan aktivitas keuangan lainnya yang

menghasilkan pembayaran tunai, penerimaan kas, dan peralihan dalam keuangan suatu instansi selama periode waktu tertentu.

Laporan arus kas, berdasarkan struktur konseptual PP No. 71 Tahun 2010, memaparkan informasi kas tentang operasi, investasi, pembiayaan, dan pendapatan. Laporan ini membahas saldo awal, perbelanjaan, pendapatan, dan saldo akhir kas pemerintah pusat dan daerah dalam jangka waktu tertentu (Erina et al., 2016: 86).

Laporan arus kas yang menunjukkan investasi, operasional, pembiayaan dan non anggaran serta uang yang masuk dan keluar dari pemerintah daerah selama periode tertentu, merupakan bagian penting dari laporan keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2007:172), laporan arus kas memiliki 3 (tiga) manfaat yaitu:

1. Mengetahui apa yang menyebabkan anggaran berlebihan atau berkurang.
2. Memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal di masa depan.
3. Memprediksi bagaimana pemerintah daerah akan terus memberikan pelayanan kepada publik.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yakni salah satu laporan yang informasinya disajikan secara rinci pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Pembaca dapat mendapat pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan melihat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi yang merupakan prinsip *good governance* akan membantu mengungkapkan kebijakan pemerintah dalam hal penganggaran dan pengelolaan aset (Sholihin & Ratmono, 2015:68).

Banyak pihak yang bergantung pada bahan yang diberikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, menurut Hapsari (2008), Catatan atas Laporan Keuangan harus memaparkan informasi yang memudahkan pengguna untuk memahaminya. Tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk menjalankan tugas pertanggungjawaban, pengurusan dan pengawasan.

7. Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan memiliki peran sangat berpengaruh dalam menjelaskan data keuangan. Oleh sebab itu, rasio keuangan banyak digunakan untuk menelaah laporan keuangan dengan tujuan membantu membuat kebijakan sesuai dengan tujuan entitas, dengan cara mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas.

Mahmudi (2016) menerangkan bahwa kinerja keuangan pemerintah bisa dievaluasi dengan memakai analisis rasio keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh selama periode tertentu dengan hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya.

Martono dan Agus (2001:240) mengatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat membantu pada hal-hal berikut:

1. Mengambil keputusan tentang penanaman modal.
2. Mengambil keputusan tentang pemberian pinjaman.
3. Menilai aliran kas masuk dan keluar.
4. Menilai sumber-sumber ekonomi.
5. Tuntutan terhadap sumber-sumber dana.
6. Melihat bagaimana sumber-sumber dana berubah.
7. Melihat bagaimana dana digunakan.

Laporan keuangan pemerintah dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa cara, seperti:

1. Rasio Efektivitas

Tingkat output organisasi, kebijakan, dan metode yang berkembang adalah definisi efektivitas. Efektif adalah kaitan antara output dan tujuan (Beni, 2016:69)

Tercapai tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya termasuk definisi efektivitas (Mardiasmo, 2017: 134). Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuannya.

Mahmudi (2010) mengatakan bahwa rasio efektivitas PAD memperlihatkan seberapa baik pemerintah daerah dalam memobilisasi PAD sesuai target. Sebaliknya, Halim (2007:232) mengatakan bahwa kapabilitas daerah dalam menyelesaikan kewajiban dianggap efektif jika rasio yang didapatkan minimal 1 (satu) atau 100 persen. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas daerah. Untuk mengetahui

rasio efektivitas dapat dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan PAD yang telah diperhitungkan sebelumnya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ukuran rasio efektivitas menurut Muhammad Mahsun (2009), adalah sebagai berikut:

1. Nilai yang diperoleh lebih rendah dari 100% ($x < 100\%$) tidak efektif
2. Nilai yang didapat sama dengan 100% ($x = 100\%$) adalah efektivitas seimbang, dan
3. Nilai yang diperoleh lebih tinggi dari 100% ($x > 100\%$) efektif

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi suatu perusahaan atau organisasi dapat diukur dengan melihat rasio input-outputnya. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin efisien suatu organisasi (Mardiasmo, 2009:133).

Menurut Mahmudi (2019:85), suatu organisasi atau aktivitas dianggap efisien jika dapat mewujudkan output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin.

Salah satu cara menghitung efisiensi menurut Mahmudi (2009:133) adalah dengan menyamakan biaya aktual dengan biaya standar. Ini dapat dicapai dengan menggunakan rumus ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

- 100% Keatas = Tidak Efisien

- 100% = Efisien Berimbang
- Kurang dari 100% = Efisien

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk melihat apakah kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran tertentu terjadi peningkatan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif pada tahun anggaran pada periode anggaran yang sama (Mahudi, 2010).

Dengan mengetahui bagaimana pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran telah meningkat, dapat ditentukan potensi mana yang harus diperhatikan (Abdul Halim, 2007). Perhitungan rasio pertumbuhan, digunakan rasio berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan/PAD/Belanja Daerah dan Belanja Modal/Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasional yang dihitung pada tahun ke-0

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 0%-10% = Sangat Rendah
- 11%-20% = Rendah
- 21%-30% = Sedang
- >40% = Tinggi

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eirene Harefa/2021	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2019	Deskriptif Kualitatif	Analisis Variansi Pengeluaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan selisih antara realisasi anggaran karena penghematan, sisa dana yang tidak terpakai, dan lelang proyek fisik. Pertumbuhan belanja pada 2018 dan 2019 meningkat karena penegakan hukum. Secara keseluruhan, program mencapai target dan berjalan dengan baik.
2	Sakina Nusarifa Tantri, Putri Irmawati/2018	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas	Kualitatif	Hasil analisis variansi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hasil

		<p>Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012- 2016</p>		<p>analisis kesesuaian belanja menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan harmonisasi belanja yang ditunjukkan dengan proporsi belanja operasional langsung yang lebih besar dari belanja modal dan belanja tidak langsung. Karena faktor inflasi, pertumbuhan belanja antara tahun 2012 dan 2016 dapat dikatakan cukup berpengaruh.</p>
3	Vinni Alvionita/2022	<p>Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian dan analisis perhitungan menunjukkan bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Bulukumba telah digunakan semaksimal mungkin. Anggaran belanja langsung memiliki rasio efektivitas terendah 90,19% pada tahun 2018, 96,01% pada tahun 2020, dan 92,16% persen pada tahun 2017, masing-masing dengan kriteria cukup efektif. Meskipun ada</p>

		Kabupaten Bulukumba		banyak anggaran yang tersisa, rasio efektifitas ini tetap cukup baik.
4	Pundy Zaghena, Michael Mamentu, Elfie Mingkid/2022	Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Minahasa Selatan	Kualitatif Deskriptif	Pada dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan, proses penyusunan LAKIP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, banyak penyusun yang enggan berkonsultasi dengan bagian organisasi tentang masalah yang mereka hadapi, yang menyebabkan komunikasi yang buruk dan informasi tidak sampai ke penerima yang tepat.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan oleh penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas adalah “diduga kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara telah tergolong baik”



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 62a, Singki', Kecamatan Rantepao, Sulawesi Selatan 91833, Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Januari 2023.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Merupakan data yang dikumpulkan dari instansi, baik secara tertulis maupun lisan, tentang gambaran umum, uraian tugas, dan struktur organisasi.

b. Data Kuantitatif

Merupakan data yang perlu diproses kembali karena didapat dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pegawai maupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

b. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui media lainnya seperti dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sebelum memulai penelitian di lapangan, penulis mempelajari teori-teori dan meninjau materi yang relevan. Penulis menggunakan tindakan ini sebagai bahan acuan dan untuk menganalisis data yang didapat.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang dikumpulkan di lapangan untuk penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara: pengumpulan data melalui wawancara dengan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
- b. Dokumentasi: pengumpulan data melalui dokumen yaitu Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2022.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa mencapai kesimpulan akhir (Sutoyo, 2015).

Analisis Rasio yang digunakan adalah :

$$1. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Rasio Pertumbuhan} = r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan maksud untuk menikmati perjalanan dan beristirahat daripada melakukan pekerjaan..
2. Manajemen keuangan adalah penelitian dan analisis tentang bagaimana penggunaan seluruh sumber daya perusahaan untuk mengatur dana dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Lima siklus utama yang harus dilakukan adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah akan penilaian sumber daya ekonomi yang dipakai untuk melakukan kegiatan operasionalnya, laporan keuangan pemerintah memegang peran yang sangat penting.
4. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan. Ini dapat dipakai untuk membandingkan hasil selama periode tertentu dengan hasil selama periode sebelumnya.
5. Rasio keuangan, yang terdiri dari rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, dapat digunakan untuk menelaah laporan keuangan.
6. Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Rasio efisiensi dapat didefinisikan sebagai pembandingan antara jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang akan diterima.
8. Rasio pertumbuhan digunakan sebagai penentuan kinerja keuangan pemerintah, apakah telah mengalami pertumbuhan selama periode anggaran.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

1. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota yang terletak di Kota Rantepao ini berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terbentuk sebagai hasil pengembangan dari Kabupaten Tana Toraja, menurut UU Nomor 28 Tahun 2008.

Pada tahun 2010, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terbagi atas tiga dinas: Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pergabungan ini dilakukan dengan nama Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Matius Sampelalong, SE., M.Si, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, dengan Mudaril A. Rantetondok sebagai sekretaris.

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

a. Visi

“Menjadikan Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Pernyataan visi diatas bermakna:

- 1) Destinasi wisata utama yang memiliki daya tarik alam (ekologi dan petualangan), budaya (peninggalan sejarah, kuliner, religi dan pedesaan), dan kehidupan sehari-hari dan buatan (wisata MICE dan acara, wisata olah raga, wisata kawasan khusus/pariwisata terpadu, dan wisata minat khusus).
- 2) Kompetitif, terdapat keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan tempat lain.
- 3) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan dan keseimbangan.

b. Misi

Adapun misi yang dimaksud adalah:

- 1) Pengembangan Tempat Wisata,

Peningkatan kualitas destinasi wisata lokal, pembangunan kawasan wisata/ODTW lokal, peningkatan pilihan produk wisata alam dan budaya lokal, dan peningkatan pengelolaan wisata alam dan budaya lokal adalah semua bagian dari misi tersebut.

- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata.

Untuk meningkatkan kepariwisataan daerah, tujuan ini menuntut peningkatan kerjasama kelembagaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

- 3) Pengembangan Ekonomi Pariwisata

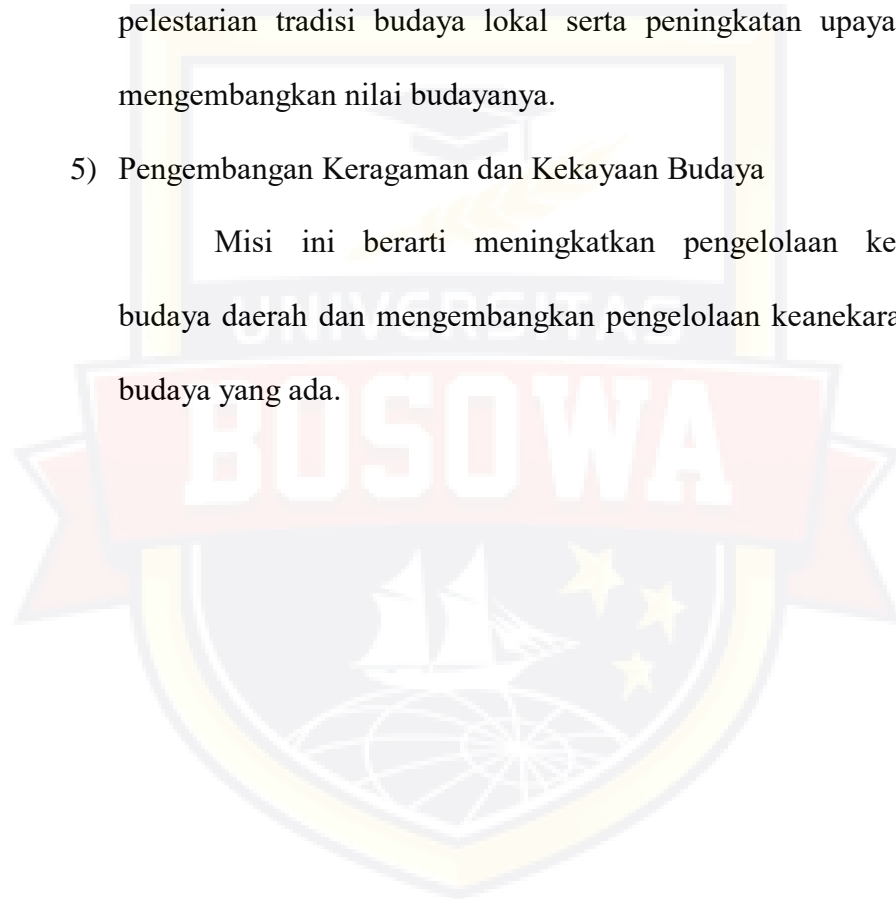
Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan dan pelestarian adat dan budaya harus dilanjutkan, serta peningkatan pengeluaran untuk mengembangkan nilai-nilai budaya.

4) Pelestarian Adat dan Budaya

Misi ini menunjukkan pentingnya pengembangan dan pelestarian tradisi budaya lokal serta peningkatan upaya untuk mengembangkan nilai budayanya.

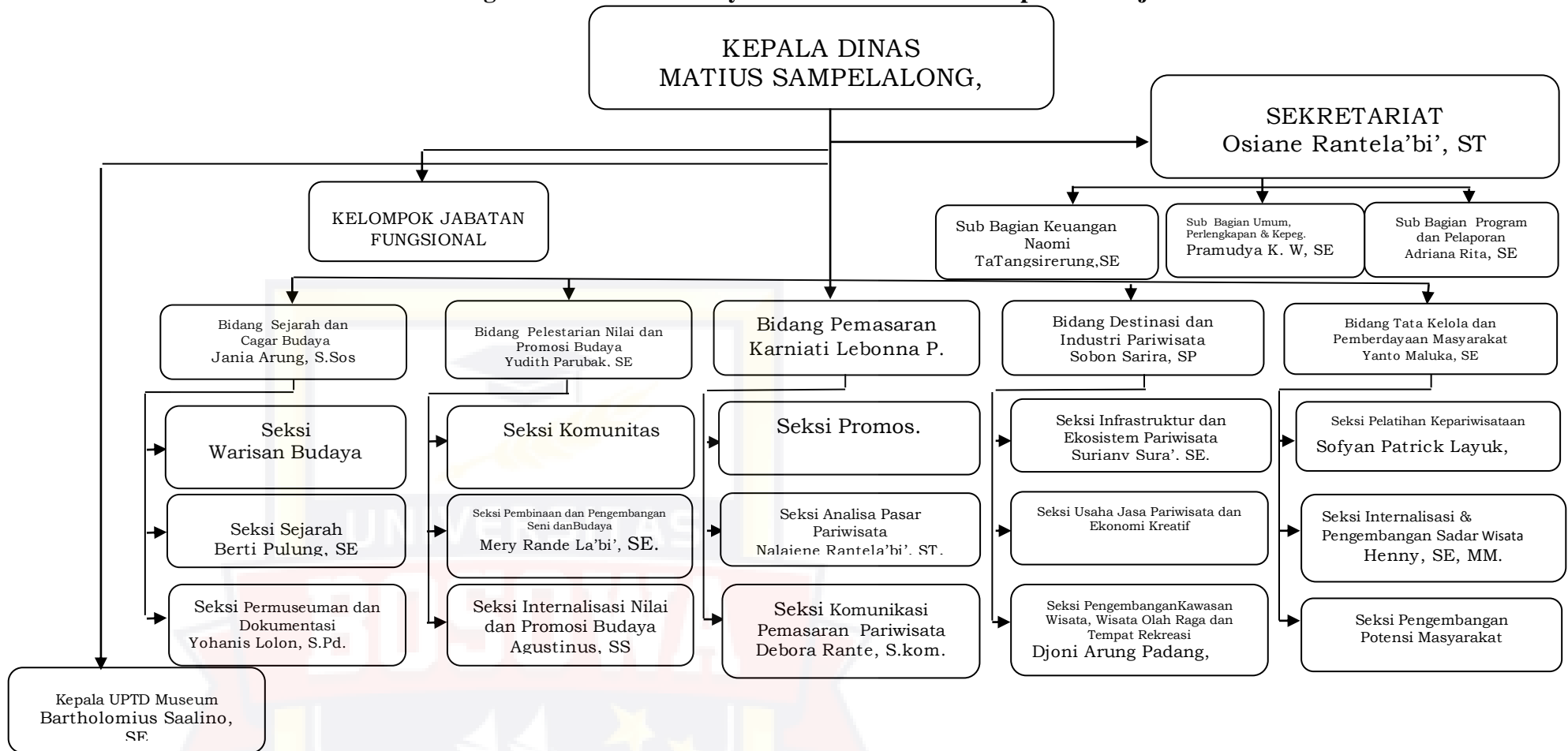
5) Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Misi ini berarti meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah dan mengembangkan pengelolaan keanekaragaman budaya yang ada.



3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Dalam penelitian ini, tujuan menganalisis laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah melihat apakah kinerja keuangannya sehat dan transparan. Untuk menjabarkan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, penulis menggunakan rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.

2. Rasio Efektivitas

Rasio keberhasilan PAD menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat memobilisasi PAD sesuai targetnya (Mahmudi 2015:114). Bilamana rasio yang diperoleh minimal 1 (satu) atau 100 persen, maka kapabilitas daerah dalam menyelesaikan tugas dianggap efektif. Perhitungan rasio efektivitas dapat menggunakan rumus perhitungan di bawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2019	Rp3.076.000.000	Rp3.170.305.000	103	Efektif

2020	Rp3.076.000.000	Rp1.030.775.000	34	Tidak Efektif
2021	Rp3.076.000.000	Rp1.763.550.000	57	Tidak Efektif
2022	Rp3.650.000.000	Rp2.908.915.000	80	Tidak efektif

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (diolah), 2023

Bersumber pada perhitungan Rasio Efektivitas PAD, terlihat bahwa anggaran PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2021 sama, namun mengalami peningkatan pada periode 2022. Efektivitas PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 sebesar 103%, tahun 2020 turun menjadi 34%, tahun 2021 naik menjadi 57%, dan tahun 2022 naik menjadi 80%. Tahun 2019 dapat dikatakan efektif karena menunjukkan hasil lebih dari 100%.

Berdasarkan analisis perhitungan Rasio Efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat dinyatakan belum efektif disebabkan rata-rata efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu 68,5%. Penurunan kuantitas wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Toraja Utara ini merupakan salah satu imbas dari penyebaran virus COVID-19 yang mewajibkan setiap orang untuk menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Sebagai upaya peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melakukan percepatan Pembangunan kawasan wisata.

3. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2009:133) menyatakan bahwa rasio input dan output adalah cara terbaik untuk mengukur efisiensi. Tingkat efisiensi berkorelasi positif dengan output. Biaya yang sebenarnya dan biaya standar dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat efisiensi (Mahmudi 2009:133). Rasio efisiensi adalah perbandingan antara keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang didapatkan. Rumus berikut dapat digunakan untuk mengukur efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2019	Rp10.285.232.363	Rp3.170.305.000	324	Tidak Efisien
2020	Rp7.244.583.521	Rp1.030.775.000	703	Tidak Efisien
2021	Rp12.781.567.158	Rp1.763.550.000	725	Tidak Efisien
2022	Rp7.001.320.549	Rp2.908.915.000	241	Tidak Efisien

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (diolah), 2023

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi diketahui realisasi total pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata rata-rata mengalami penurunan dari 2019 hingga 2020 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2019 pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.170.305.000 lalu turun menjadi Rp1.030.775.000 pada tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan

pada periode 2021 menjadi Rp1.763.550.000. pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp2.908.915.000.

Selain itu, peningkatan pendapatan juga disertai dengan peningkatan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Belanja total dinas pada tahun 2019 sebesar Rp10.285.232.363 turun pada tahun 2020 sebesar Rp7.244.583.521. Kemudian kembali naik pada tahun 2021 sebesar Rp12.781.567.158 dan kembali turun pada tahun 2022 sebesar Rp7.001.320.549.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efisiensi, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki efisiensi keuangan sebesar 324% dengan kriteria tidak efisien pada tahun 2019, kemudian sebesar 703% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menjadi 725%, lalu menjadi 241% pada tahun 2022. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki rata-rata efisiensi sebesar 498,25% dari tahun 2019 hingga 2022. Dengan kata lain tidak efisien karena efisiensi keuangan ini melebihi 100%. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan masih buruk dalam menekan jumlah belanja yang disesuaikan dengan pendapatannya.

4. Rasio Pertumbuhan

Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan serta mempertahankan pertumbuhan pendapatannya dapat dilihat pada rasio pertumbuhannya. Penentuan potensi yang harus ditingkatkan dapat

diketahui dengan melihat peningkatan sumber pendapatan dan pengeluaran (Abdul Halim, 2007). Perhitungan rasio pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2019	Rp3.170.305.000	Rp10.285.232.363
2020	Rp1.030.775.000	Rp7.244.583.521
2021	Rp1.763.550.000	Rp12.781.567.158
2022	Rp2.908.915.000	Rp7.001.320.549

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara (data diolah)

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{Rp3.170.305.000 - 0}{0} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{Rp1.030.775.000 - Rp3.170.305.000}{Rp3.170.305.000} \times 100\% = -67\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{Rp1.763.550.000 - Rp1.030.775.000}{Rp1.030.775.000} \times 100\% = 71\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{Rp2.908.915.000 - Rp1.763.550.000}{Rp1.763.550.000} \times 100\% = 65\%$$

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara Periode 2019-2022.**

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp}10.285.232.363 - 0}{0} \times 100\% = 0$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp}7.244.583.521 - \text{Rp}10.285.232.363}{\text{Rp}10.285.232.363} \times 100\% = -30\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp}12.781.567.158 - \text{Rp}7.244.583.521}{\text{Rp}7.244.583.521} \times 100\% = 76\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp}7.001.320.549 - \text{Rp}12.781.567.158}{\text{Rp}12.781.567.158} \times 100\% = -45\%$$

**Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Toraja Utara Periode 2019-2022**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Pertumbuhan Realisasi Belanja
2019	Rp3.170.305.000	0	Rp10.285.232.363	0
2020	Rp1.030.775.000	-67%	Rp7.244.583.521	-30%
2021	Rp1.763.550.000	71%	Rp12.781.567.158	76%
2022	Rp2.908.915.000	65%	Rp7.001.320.549	-45%

Sumber Data: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan peningkatan dari periode 2019 ke periode 2022. Pada tahun 2019 sebesar Rp3.170.305.000 kemudian pada periode 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.030.775.000. Kemudian meningkat menjadi Rp 1.763.550.000 pada periode 2021. Kemudian meningkat lagi pada periode 2022 sebesar Rp 2.908.915.000.

Kemudian, realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan juga peningkatan. Realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Tahun 2019 Utara sebesar Rp. 10.285.232.363. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp 7.244.583.521. Terjadi kenaikan sebesar Rp12.781.567.158 pada tahun 2021. Kemudian turun lagi sebesar Rp7.001.320.549.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus rasio pertumbuhan, diketahui bahwa pada tahun 2020 realisasi rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -67% termasuk dalam kriteria sangat rendah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 71% dengan kategori tinggi. Kemudian kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 65% dalam kategori tinggi. Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah 17,25% sehingga masuk dalam kategori rendah. Selain itu, diketahui pula bahwa rasio pertumbuhan realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengalami peningkatan dan penurunan. Rasio pertumbuhan belanja aktual tahun 2020 adalah -30% yang menandakan bahwa masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 76% yang menandakan bahwa masuk dalam kategori tinggi. Kemudian pada tahun 2022 akan menurun sebanyak -45% dalam kategori sangat rendah. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 1% sehingga masuk dalam kategori sangat rendah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara belum baik jika dilihat dari laporan keuangan periode 2019-2022.

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas, dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 103% yang tergolong efektif. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 34% yang tergolong tidak efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 57% namun masih tergolong tidak efektif. Lalu pada tahun 2022 naik menjadi 80% namun juga masih tergolong tidak efektif. Jika dirata-ratakan rasio efektifitasnya dari tahun 2019-2022 adalah sebesar 68,5% sehingga dapat dikategorikan menjadi tidak efektif.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio efisiensi dapat dilihat bahwa rasio efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 324% yang tergolong tidak efisien. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 703% yang tergolong tidak efisien. Lalu pada tahun 2021 menjadi 725% yang tergolong tidak efisien. Pada tahun 2022 menjadi 241% yang tergolong tidak efisien. Jika dirata-ratakan rasio efisiensinya dari tahun 2019-2022 adalah sebesar 498,25% sehingga dapat dikategorikan menjadi tidak efisien.

3. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus rasio pertumbuhan, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah sebesar -67% sehingga tergolong sangat rendah. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 71% yang tergolong tinggi. Pada tahun 2022 menjadi 65% yang tergolong tinggi. Jika dirata-ratakan rasio pertumbuhan realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara adalah 23% sehingga tergolong dalam pertumbuhan sedang. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus yang sama, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 adalah sebesar -30% yang tergolong sangat rendah. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 76% yang tergolong sangat tinggi. Lalu pada tahun 2022 adalah sebesar -45% sehingga tergolong sangat rendah. Jika dirata-ratakan rasio pertumbuhan realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara sebesar 1% sehingga tergolong ke dalam pertumbuhan sangat rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis adalah:

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

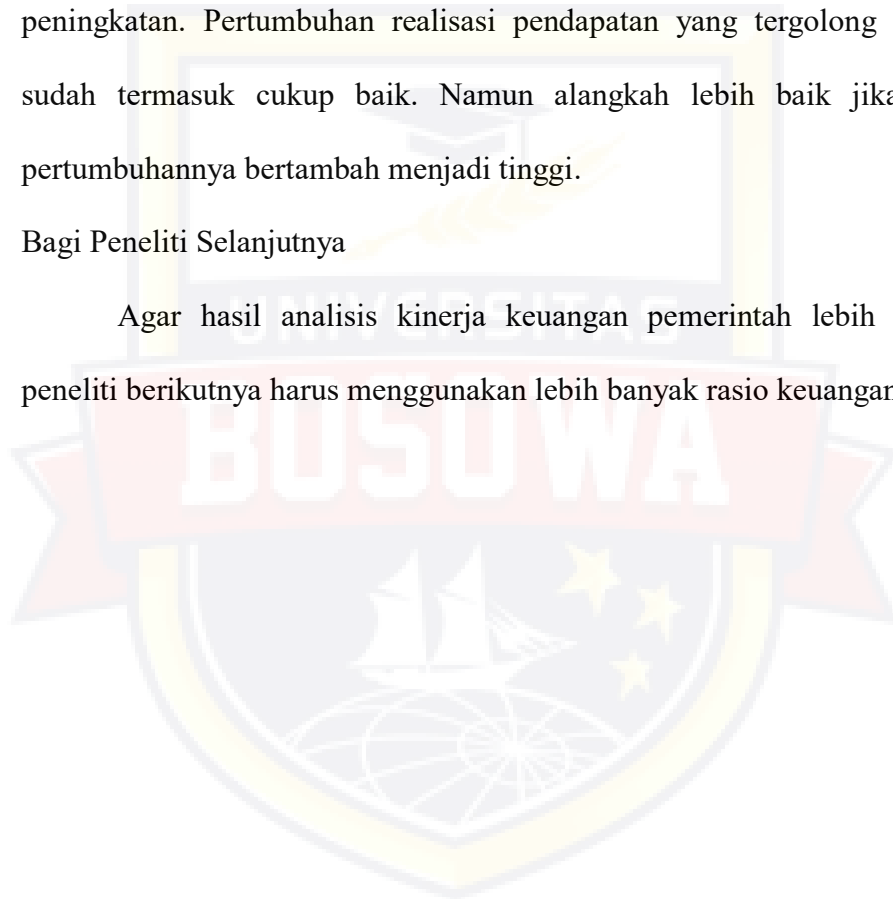
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan efektivitas pedapatannya dengan meningkatkan realisasi

pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Kemudian meningkatkan realisasi pendapatan agar perbandingan antara pendapatan dan belanja dapat menjadi efisien.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara harus mengoptimalkan realisasi pendapatan sehingga dapat mengalami peningkatan. Pertumbuhan realisasi pendapatan yang tergolong sedang sudah termasuk cukup baik. Namun alangkah lebih baik jika rasio pertumbuhannya bertambah menjadi tinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar hasil analisis kinerja keuangan pemerintah lebih akurat, peneliti berikutnya harus menggunakan lebih banyak rasio keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andre B. Wehantouw, J. J. (2015). Analisis Laporan Arus Kas Operasi, Investasi Dan Pendanaan Pada PT. Gudang Garam TBK. *Jurnal EMBA*, Volume 3, 806-817.
- Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 2018-226.
- Erniati. (2019, September 6). *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Diambil kembali dari KEMENKEU RI DITJEN PERBENDAHARAAN KANWIL DJPb PROV. SULTENG: <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Fahmi, I. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Humas. (2022, Januari 15). *Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Aset Barang Milik Negera di Lingkungan Pemerintah*. Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pengelolaan-aset-barang-milik-negera-di-lingkungan-pemerintah/>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masri Ridwan, A. F. (2016, Januari 1). Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata. *Jurnal Pendidikan*, hal. Halaman 1-10.
- Muhammad Satar, Y. A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Penggunaan Laporan Keuangan Daerah Terhadap

- Capaian Kinerja Instansi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 11, Nomor 3, Halaman 80-92.
- Muhammad Sujai, S. M. (2022). *Manajemen Keuangan*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Rika Henda Safitri, A. N. (2017). Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus Pada RSUD di Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5.
- Samsurijal Hasan, E. J. (2022). *Manajemen Keuangan*. Penerbit Widina.
- Sidik, M. (t.thn.). *Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal*. Diambil kembali dari Artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://djkn.kemekeu.go.id>
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winowatan, J. P. (2021). Dampak Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Ke'Te' Kesu' Pada Kabupaten Toraja Utara. *Seminar Nasional dan Call For Papers 2021*, 1-11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 1807EB/UNIBOS/XII/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Ayuh Jeliana Agian Tiballa
NIM : 4519012078
Program Studi : Manajemen
No. Tlp/HP : 085242704041
Alamat : Perumahan Dosen Unhas EC/2i Kota Makassar
Waktu Penelitian : Desember 2022 – Januari 2023

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 21 Desember 2022
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM
NIDN. 09 2412 680

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

2. Surat Rekomendasi


PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Pongtiku No.32 Rantepao Telp. : (0423) 2922333 Email : dpmptsp.torut@gmail.com
 Website : http://dpmptsp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 401/SRP/DPMTSP/XII/2022

Menunjuk Surat **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **PROVINSI SULAWESI SELATAN** Nomor : 13742/S.01/PTSP/2022, Perihal **Izin Penelitian** dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Ayuh Jeliana Aglan Tiballa**
 Nomor Pokok : **4519012078**
 Program Studi : **Manajemen**
 Alamat : **Tagari Tallunglipu**

yang bermaksud mengadakan **Penelitian** dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan Judul: **Analisis Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **2 Januari 2023** sampai **2 Februari 2023**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "**Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


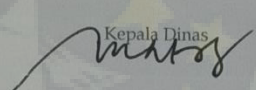
Rantepao, 3 Januari 2023
KEPALA DPMTSP,
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 J. HARLI PATRIATNO, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19670503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa di Makassar;
6. Peninggal;

3. Lembar Disposisi

 PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Ahmad Yani No. 62 A Telp./Fax (0423) 21277/25455 Rantepao sekretarisdisbudpartorut@gmail.com	
LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : PTSP No. Surat : 401/SP/DP/PTSP/XII/2022 Tgl. Surat : 3 Januari 2023	Diterima Tgl. : 06 Januari 2023 No. Agenda : 0001 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Penerbitan	
<input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Bidang Sejarah dan Cagar Budaya <input type="checkbox"/> Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya <input type="checkbox"/> Bidang Pemasaran <input type="checkbox"/> Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata <input type="checkbox"/> Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasi
Catatan : Penerbitan surat izin Penelitian 6/1-2023	
Kepala Dinas  MATIUS SAMPELALONG, SE. M.Si	

4. Laporan Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022

	Target	Realisasi
2019	→ 3.076.000.000	3.798.27 3.170.305
2020	→ 3.076.000.000	1.030.775.000
2021	→ 3.076.000.000	1.763.550.000
2022	→ 3.500.000.000	2.908.915.000

5. Laporan Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022

Tahun 2019

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	PELAKSANA	DPA	Kontrak	REALISASI		% KEU	DEVIASI (S)	Sisa Kontrak	
							KEUANGAN (Rp)	% FISIK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Total			11.683.137.807	11.683.137.807	10.285.232.363	88,55	96,04	-	1.397.905.444	
1	Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.226.010.044	1.226.010.044	1.186.353.387	100,00	96,93		37.656.657	
2.16.01.01		Penediaan jasa surat menyurat			2.468.000	2.468.000	1.696.000	100,00	68,72		572.000	
		Cek	3 Bksk	Dibayar	300.000	300.000	90.000	100,00	33,33		200.000	
		Mutasi	272 Bksk	Dibayar	1.568.000	1.568.000	1.196.000	100,00	76,21		372.000	
		Batas Pula Penerimaan	10 Bksk	Dibayar	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.01.02		Penediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			53.844.000	53.844.000	52.152.645	100,00	96,86		1.691.355	
		Biaya Telpon	12 Bksk	Dibayar	622.000	622.000	590.807	100,00	71,87		231.193	
		Biaya Air	12 Bksk	Dibayar	3.600.000	3.600.000	3.597.190	100,00	72,16		1.002.810	
		Biaya Listrik	12 Bksk	Dibayar	30.600.000	30.600.000	30.383.128	100,00	98,21		216.872	
		Biaya Kawat/Faktorul/TV Kabel	1 Bksk	Dibayar	18.222.000	18.222.000	18.484.233	100,00	98,84		237.767	
2.16.01.07		Penediaan jasa administrasi keuangan			24.206.000	24.206.000	24.070.000	100,00	99,44		136.000	
		Biaya Jasa Telemeter	12 Bksk	Dibayar	528.000	528.000	519.000	100,00	74,14		109.000	
		Insentif Pegawai Hesar/Tidak Tetap	12 Bksk	Dibayar	23.680.000	23.680.000	23.480.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.01.08		Penediaan jasa kebersihan kantor			4.903.000	4.903.000	3.237.661	100,00	66,03		1.665.339	
		Biaya Pembelian Bahan dan Bahan Pembersih	12 Bksk	Dibayar	2.500.000	2.500.000	2.422.900	100,00	96,81		77.000	
		Biaya Pembelian Perlengkapan dan Mula	12 Bksk	Dibayar	2.400.000	2.400.000	814.561	100,00	33,94		1.585.439	
2.16.01.10		Penediaan Ketatausahaan Administrasi			189.532.000	189.532.000	178.511.250	100,00	94,16		11.020.750	
		Uang Lembur PNS	300 Jam	Dibayar	5.394.000	5.394.000	5.345.000	100,00	93,25		39.000	
		Biaya Jabat Kantor	12 Bksk	Dibayar	25.795.000	25.795.000	25.395.000	100,00	98,85		400.000	
		Biaya Jidat	12 Bksk	Dibayar	1.960.000	1.960.000	1.846.000	100,00	94,18		114.000	
		Foto Cetak	1 Korpota	Dibayar	2.655.000	2.655.000	2.425.000	100,00	98,87		230.000	
		Biaya Pengadaan	100000 Lembar	Dibayar	7.588.000	7.588.000	7.570.000	100,00	99,25		18.000	
		Biaya Makanan dan Minuman Hara Pegawai/Diisi dan makan luar	12 Bksk	Dibayar	103.760.000	103.760.000	100.470.000	100,00	97,54		3.290.000	
		Biaya Makanan dan Minuman Pegawai	12 Bksk	Dibayar	28.250.000	28.250.000	25.250.000	100,00	96,79		3.000.000	
		Uang Lembur PNS (PNS)	12 Bksk	Dibayar	3.600.000	3.600.000	3.490.000	100,00	100,00		0,00	
		Uang Lembur Pegawai TIC	1 Korp	Dibayar	6.000.000	6.000.000	5.518.000	100,00	92,30		482.000	
2.16.01.12		Penediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			62.822.000	62.822.000	58.194.500	100,00	92,62		4.627.500	
		Biaya Alat Listrik dan Elektrikal (Lampir, Busbar, Kabel)	12 Bksk	Dibayar	62.822.000	62.822.000	58.194.500	100,00	92,62		4.627.500	
2.16.01.14		Penyediaan Perlengkapan Bekas Kerja			2.019.000	2.019.000	2.043.000	100,00	98,70		21.000	
		Biaya Pengadaan Tabung Gas	24 Bksk/Tabung	Dibayar	1.200.000	1.200.000	1.170.000	100,00	97,50		30.000	
		Biaya Peralatan Alat Bekas Kerja	45 Lusin	Dibayar	819.000	819.000	873.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.01.14		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			13.405.044	13.405.044	12.470.000	100,00	93,02		935.044	
2.16.01.14		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			13.405.044	13.405.044	12.470.000	100,00	93,02		935.044	
		Biaya Jasa Kopir/Tempa dan Printout	12 Bksk	Dibayar	13.405.044	13.405.044	13.470.000	100,00	53,02		935.044	
2.16.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			246.100.000	246.100.000	245.088.311	100,00	99,59		1.011.689	
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bksk	Dibayar	37.600.000	37.600.000	37.155.000	100,00	98,76		445.000	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Korp	Dibayar	179.500.000	179.500.000	178.950.311	100,00	99,89		549.689	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar Negara (Sabbatical Luar)	1 Korpota	Dibayar	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.01.21		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran			626.600.000	626.600.000	610.300.000	100,00	97,49		15.700.000	
		Biaya Uprg Tenaga Korp	1702 Orang/Bksk	Dibayar	543.400.000	543.400.000	523.700.000	100,00	97,11		19.700.000	
		Tanggula upr PM bulan Mei - Desember 2018	2 Bksk	Dibayar	83.200.000	83.200.000	83.200.000	100,00	100,00		0,00	
2	Kebudayaan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur			169.906.280	169.906.280	149.154.773	95,29	87,79		20.751.507	
2.16.02.07		Penyediaan perlengkapan gedung kantor			24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Mula Kertas	4 Upr	Dibayar	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Mula Papat	1 Upr	Dibayar	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Peralt Pinter	10 Upr	Dibayar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.02.09		Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor			53.306.000	53.306.000	53.306.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Laptop	2 Upr	Dibayar	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Personal Komputer (Komputer + Printer)	1 Upr	Dibayar	19.300.000	19.300.000	19.300.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Kursur	1 Upr	Dibayar	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Model Pengadaan Alat Koneksi (Organ)	1 Upr	Dibayar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.02.22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			2.466.000	2.466.000	2.466.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Gedung	Dibayar	2.466.000	2.466.000	2.466.000	100,00	100,00		0,00	
2.16.02.23		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			30.324.030	30.324.030	30.857.582	100,00	99,79		66.448	
		Biaya BBM Kelas Korp/Dinas	12 Bksk	Dibayar	16.700.000	16.700.000	16.694.552	100,00	99,90		5.448	
		Biaya Penggantian Suku Cadang	12 Bksk	Dibayar	11.800.000	11.800.000	11.800.000	100,00	100,00		0,00	
		Biaya pajak dan Parkir Kendaraan	2 Bksk	Dibayar	2.424.030	2.424.030	2.374.030	100,00	97,54		50.000	
2.16.02.24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			46.222.250	46.222.250	33.583.529	82,85	72,66		12.638.721	
		Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 4	1 Upr	Dibayar	11.890.000	11.890.000	8.465.455	100,00	79,59		2.424.545	
		Biaya BBM Kendaraan Dinas Roda 2	4 Upr/BBM/Motor	Dibayar	1.200.000	1.200.000	330.000	100,00	3,05		1.869.000	
		Biaya BBM/Mobil/Kendaraan	1901 Upr	Dibayar	2.800.000	2.800.000	2.816.377	100,00	92,71		213.623	
		Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	1 Upr	Dibayar	3.600.000	3.600.000	3.583.000	100,00	99,54		17.000	
		Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	4 Upr/BBM/Motor	Dibayar	6.000.000	6.000.000	6.081.239	100,00	101,41		81.239	
		Biaya Penggantian Suku Cadang Mobil/Kendaraan	1 Upr	Dibayar	2.475.000	2.475.000	2.400.000	100,00	97,07		75.000	
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	1 Upr	Dibayar	2.125.750	2.125.750	2.125.750	100,00	100,00		0,00	
		Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	4 Upr/BBM/Motor	Dibayar	1.180.000	1.180.000	1.180.000	100,00	100,00		0,00	
		Pajak Kendaraan Mobil Bodiopas/Killing	1 Upr	Dibayar	8.000.000	8.000.000	-	-	-		8.000.000	
2.16.02.26		Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor			-	-	-	-	-		0,00	
		Biaya pemeliharaan gedung kantor	-	Dibayar	-	-	-	-	-		-	
2.16.02.28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			13.000.000	13.000.000	4.353.600	100,00	38,10		8.646.400	
		Biaya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 Gedung	Dibayar	13.000.000	13.000.000	4.353.600	100,00	38,10		8.646.400	
3	Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	-	-		0,00	
2.16.05.02		Sosialisasi peraturan perundang-undangan			-	-	-	-	-		0,00	

Table with multiple columns: Item Description, Unit, Quantity, Unit Price, Total Value, Budget, and Status. It lists various items like 'Belanja ATK', 'Belanja Pengadaan', and 'Program Peningkatan Sistem Pelaporan'. The table is organized into sections, such as 'Kebudayaan' and 'Peningkatan Kualitas Kejuruan Bidan dan Parwisata'.

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan		
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fiask (%)			Nomor	Tanggal	
2 16 1 02	Kebudayaan						431,336,000	431,336,000	393,876,434	91.26	98.48	37,463,566				
2 16 1 02 85	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						40,000,000	40,000,000	39,429,500	98.57	100.00	570,500				
5 2 3 17 01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua	1	Unit				40,000,000	40,000,000	39,429,500	98.57	100.00	570,500				
2 16 1 02 87	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						78,366,000	78,366,000	55,335,000	88.14	88.14	14,971,000				
5 2 2 32 12	Belanja Pengadaan Kursi Kerja	12	Unit/Paket				42,091,000	42,091,000	27,120,000	64.43	64.43	14,971,000				
5 2 3 30 03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat	1	Unit				2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00	-				
5 2 3 30 06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu (Sivangan Pejabat)	2	Set. Buah				26,215,000	26,215,000	26,215,000	100.00	100.00	-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2 16 1 02 89	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						29,000,000	29,000,000	29,000,000	100.00	100.00	-				
	- Belanja Moda Pengadaan Laptop	2	Unit				22,000,000	22,000,000	22,000,000	100	100.00	-				
	- Belanja Modal Pengadaan Printer	2	Unit				7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	100.00	-				
5 2 3 31 03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dokumentasi (Bd Promosi Budaya)	7	Unit				-	-	-	-	-	-				
2 16 1 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						153,530,000	153,530,000	153,171,000	99.73	99.73	419,000				
5 2 2 20 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	23	Kaleng/ Buah				153,590,000	153,590,000	153,171,000	99.73	99.73	419,000				
2 16 1 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan						58,338,000	58,338,000	43,824,853	89.46	100.00	3,393,147				
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak	12	Bulan				23,550,000	23,550,000	20,313,853	86.26	100.00	3,236,147				
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12	Bulan				24,240,000	24,240,000	23,665,000	97.63	100.00	575,000				
5 2 2 05 05	Belanja Pakaj Kendaraan Bermotor	12	Bulan				2,540,000	2,540,000	1,046,000	41.18	100.00	1,494,000				
2 16 1 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional						44,139,500	44,139,500	31,064,581	64.58	100.00	13,074,919				
5 2 2 01 09	Belanja Bahan Bakar Minyak	12	Bulan				24,568,000	24,568,000	14,105,831	57.42	100.00	10,462,169				
	- Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2	48	Bulan/Unit				-	-	-	-	-	-				
	- Belanja BBM Mobil Bioskop Keliling	200	Kali/Unit				-	-	-	-	-	-				
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12	Bulan				16,301,500	16,301,500	15,628,000	95.87	100.00	673,500				
	- Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	24	Unit/Kali				-	-	-	-	-	-				
	- Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Bioskop Keliling	1	Tahun				-	-	-	-	-	-				
5 2 2 05 05	Belanja Pakaj Kendaraan Bermotor	12	Kali/ Tahun				3,290,000	3,290,000	1,330,750	40.45	100.00	1,959,250				
	- Pakaj Kendaraan Dinas Roda 2	48	Unit/Bulan				-	-	-	-	-	-				
	- Pakaj Kendaraan Mobil Bioskop Keliling	1	Unit				-	-	-	-	-	-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2 16 1 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						33,950,500	33,950,500	31,826,500	91.37	100.00	2,124,000				
5 2 2 20 08	Belanja pemeliharaan alat kantor	1	Kegiatan/ Paket				33,950,500	33,950,500	31,020,500	91.37	100.00	2,930,000				
2 16 1 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						18,000,000	18,000,000	9,825,000	98.25	100.00	175,000				
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	23	Unit/Set				10,000,000	10,000,000	9,825,000	98.25	100.00	175,000				
2 16 1 06	Kebudayaan						6,000,000	6,000,000	5,400,000	91.67	100.00	600,000				
2 16 1 06 91	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD						1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 30 01	Honorarium Panitia Tim Penyusun Laporan capaian kinerja dan indikator kinerja	2	Orang				600,000	600,000	600,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20	Rim/Buah/ Dot				525,000	525,000	525,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	1500	Lembar				375,000	375,000	375,000	100.00	100.00	-				
2 16 1 06 94	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						1,500,000	1,500,000	900,000	66.67	100.00	600,000				
5 2 2 01 01	ATK	16	Rim/Buah/ Dot/Botol				525,000	525,000	525,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	1500	Lembar				375,000	375,000	375,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 30 01	Honor Panitia Penyusun Laporan Keuangan Akhir	2	Orang				600,000	600,000	-	-	-	600,000				
2 16 1 06 83	Penyusunan Renja dan Forum SKPD						1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 01 01	Belanja ATK	12	Rim/Buah/ Dot/Botol				525,000	525,000	525,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	300	Lembar				75,000	75,000	75,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 30 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3	Orang				900,000	900,000	900,000	100.00	100.00	-				

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fiak (%)			Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2 16 1 15 07	Pengembangan Statistik Wisata Terpadu						3,864,125	3,864,125	3,864,125	100.00	100.00	-			
5 2 2 01 01	ATK Pendataan Data Kunjungan di Hotel	27	Rim/Buah/ Pasang/ Unt				500,000	500,000	500,000	100.00	100.00	-			
5 2 2 06 03	Foto Copy	2000	Lembar				500,000	500,000	500,000	100.00	100.00	-			
5 2 2 15 01	SPPD Dalam daerah Pendataan Kunjungan Wisatawan	40	Orang/Kali				2,064,125	2,064,125	2,064,125	100.00	100.00	-			
2 16 1 06	Kebudayaan						1,020,885,000	1,020,885,000	875,155,375	90.29	100.00	141,729,625			
2 16 1 16 06	Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata						429,885,000	429,885,000	355,672,000	97.72	100.00	65,213,000			
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat						429,885,000	429,885,000	355,672,000	97.72	100.00	65,213,000			
5 2 2 01 01	Belanja ATK		Rim/Buah/ Dos/Unit / Pak				-	-	-	-	-	-			
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	5518	Lembar				178,000	178,000	-	-	-	178,000			
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51	Orang/ Kali				2,076,500	2,076,500	2,013,000	96.94	100.00	63,500			
	Revitalisasi/Penataan Rumah Adat/Tongkonan						374,870,000	374,870,000	315,832,000	99.85	100.00	59,038,000			
	Revitalisasi Lumbung Tongkonan Adat Saibangan, Tondok Lingsi	1	Paket				85,365,000	85,365,000	85,164,000	99.76	100.00	201,000			
	Penataan Lokasi Tongkonan Awo Tiru' Allo Lembang Saridan, Kec. Saridan	1	Paket				88,000,000	88,000,000	87,906,000	99.89	100.00	94,000			
	Penataan Objek Wisata Tongkonan Pongtiku Poka, Lembang Batu, Kec. Rindingallo	1	Paket				-	-	-	-	-	-			
	Revitalisasi Lumbung Desa Adat Tongkonan Tambalang, Lembang Tampan Bonga	1	Paket				97,015,000	97,015,000	96,960,000	100	100.00	55,000			
	Penataan Tongkonan Toban Banua Lembang Saridan Tinole	1	Paket				58,590,000	58,590,000	-	-	-	58,590,000			

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fiak (%)			Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	pelebaran Kawasan Lingkungan Tongkonan Kecamatan Kecamatan Saridan Madoke, Kecamatan Saridan	1	Paket				-	-	-	-	-	-			
	Penataan Tongkonan Rante Dengan Kelurahan Parigi Kecamatan Saridan	1	Paket				45,900,000	45,900,000	45,802,000	100	100.00	98,000			
	Honor Panitia Petakarna Kegiatan						43,769,500	43,769,500	37,827,000	96.37	100.00	5,933,500			
	Perencanaan	1	Paket				18,406,000	18,406,000	16,302,000	88.57	100.00	2,104,000			
	Pengawasan	1	Paket				13,804,500	13,804,500	12,375,000	89.64	100.00	1,429,500			
	Honor Panitia Pembuat Kontamen	7	Org/Bln				4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00	-			
	Honor pengadaan Barang dan Jasa	6	Org/Bln				2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.00	100.00	-			
	Honor Pejabat Penetina Hasil Pengabdian	6	Org/Bln				1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	100.00	-			
	Honor PPTK	7	Org/Bln				2,450,000	2,450,000	2,450,000	100.00	100.00	-			
2 16 1 16 11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah						600,000,000	600,000,000	523,483,375	82.87	100.00	76,516,625			
5 2 2 01 01	Belanja ATK		Rim/Dos/ Buah				10,895,000	10,895,000	6,875,000	63.10	100.00	4,020,000			
5 2 2 06 03	Belanja Cetak		Lembar/ Keg/Buah				38,800,000	38,800,000	9,700,000	25.00	100.00	29,100,000			
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	26800	Lembar				6,700,000	6,700,000	-	-	-	6,700,000			
5 2 2 10 01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1	Paket				5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	-			
5 2 2 10 05	Belanja Sewa Tenda	4	Pkt/Unit/ Hari				26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-			
5 2 2 10 07	Belanja Sewa Sound System	6	Pkt/Buah/ Kali				28,000,000	28,000,000	28,000,000	100.00	100.00	-			
5 2 2 11 05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2800	Orang/ Kali				62,250,000	62,250,000	55,250,000	88.76	100.00	7,000,000			
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	220	Orang/ Keg				33,000,000	33,000,000	13,745,375	41.65	100.00	19,254,625			
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Orang/ Paket				-	-	-	-	-	-			

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fiak (%)			Nomor	Tanggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5 2 2 20 06	Belanja Pemeliharaan Asat/Tetap	22	Buah/ Paket				90,000,000	90,000,000	87,758,000	97.51	100.00	2,242,000			
5 2 2 20 08	Belanja Pemeliharaan Peralengkapan Kantor	1412	Org/Jam/ Rim/Dos/ Lmbr/Paket				182,855,000	182,855,000	174,665,000	95.52	100.00	8,190,000			
5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	313	Paket/Org/ Kali/Fax				94,500,000	94,500,000	94,490,000	99.99	100.00	10,000			
5 2 2 29 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22	Orang/ Jam				22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00	-			
2 16 01 16	Parwisata						7,835,790,000	7,835,790,000	3,949,886,750	99.50	100.00	3,886,783,250			
2 16 1 16 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)						3,195,812,000	3,195,812,000	3,116,378,625	99.88	100.00	79,433,375			
	Data Pendamping DAK (DAU)	27	Orang/ Bulan/Pkt/ Kali/LS				-	-	-	-	-	-			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84	Orang/Kali				15,000,000	15,000,000	14,999,625	100.00	100.00	375			
	Biaya Perencanaan	1	Paket				98,000,000	98,000,000	97,784,000	99.76	100.00	216,000			
	Biaya Pengawasan	1	Paket				74,197,000	74,197,000	-	-	-	74,197,000			
	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik Wisata) Kawasan Objek Wisata						3,088,615,000	3,088,615,000	3,083,615,000	100.00	100.00	5,000,000			
	Pembangunan Kios Cinderamata, Kiel Pantanakan Lolo, Kec. Kesu	5	Unit				344,000,000	344,000,000	344,000,000	100.00	100.00	-			

2 16 1 17				Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				425,368,000	425,368,000	424,960,000	99.31	99.31	400,100							
2 16 1 17 01				Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah					14,235,000	14,235,000	13,835,000	97.94	97.94	400,000							
5 2 2 01				01	Belanja ATK Dewan Kesenian	13	Rim/Wemar/Dos		0	-	-	-	-	-							
5 2 2 06				03	Belanja Cetak dan Penggandaan	2515	Lembar		-	-	-	-	-	-							
NO. REKENING				Urusan/Program/Kegiatan				Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
(1)				(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5 2 2 08				04	Belanja Transportasi Tim Kesenian	198	Orang/Kali					9,700,000	9,700,000	9,300,000	95.88	95.88	400,000				
5 2 2 11				02	Belanja Makan Minum Rapat Dewan Kesenian	200	Orang/Kali					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 11				05	Belanja Makan Minum Kegiatan Dewan Kesenian	240	Orang/Kali					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 15				01	Pejlanan Dinas Dalam Daerah	16	Orang/Kali					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 15				02	Pejlanan dinas luar daerah	5	Orang/Kali					4,535,000	4,535,000	4,535,000	100.00	100.00	-				
2 16 1 17 04				Perkembangan Keragaman Budaya Daerah									407,125,000	407,125,000	407,125,000	100.00	100.00	100			
5 2 2 01				01	Belanja ATK	6	Rim/Botol/Warna					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 02				10	Belanja Bahan Material Mobil Bioskop	10	Kali					4,725,000	4,725,000	4,725,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 06				03	Belanja Fot. Copy	3650	Lembar					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 15				01	Pejlanan Dinas Dalam Daerah	18	Orang/Kali					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 15				02	Pejlanan dinas luar daerah	3	Orang/Kali					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 21				2	Belanja Jasa Konsultasi RPOA	1	Kegiatan					400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 30				01	Belanja Honorarium Operasional Mobil Bioskop	24	Orang/ Bulan					2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.00	100.00	-				
2 16 1 17 05				Penyelenggaraan Festival budaya daerah									4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00	-			
5 2 1 02				01	Belanja ATK	1	Kag					-	-	-	-	-	-				
5 2 2 15				02	Belanja Pejlanan Dinas Luar Daerah	1	Kag					4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00	-				
5 2 2 28				01	Honorarium Panitia Kegiatan Festival	1	Tahun					-	-	-	-	-	-				



2 16 1 17				Parwisata	Program pengembangan Kemitraan				723,450,100	723,450,100	573,212,600	89.48	100.00	150,237,500			
2 16 1 17 03				Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya								-	-	-	-	-	
5 2 2 01				01	ATK Pembinaan Desa Wisata	37	Rim/Botol/Dos/Buah					-	-	-	-	-	
5 2 2 06				03	Belanja Cetak	1	Buah					-	-	-	-	-	
5 2 2 11				05	Belanja Makan Minum	60	Orang					-	-	-	-	-	
5 2 2 08				04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60	Orang					-	-	-	-	-	
5 2 2 15				01	Belanja Pejlanan Dinas	27	Orang/Kali					-	-	-	-	-	
5 2 2 23				01	Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat	1	Kegiatan					-	-	-	-	-	
5 2 2 29				02	Honor NaraSumber/Tenaga Ahli	2	Orang/Jam					-	-	-	-	-	
2 16 1 17 05				Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata								-	-	-	-	-	
5 2 2 15				02	Pejlanan Dinas Luar Daerah luar Daerah	1	Kegiatan					-	-	-	-	-	
2 16 1 17 07				Pengembangan Sumber daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata(DAK)								723,450,100	723,450,100	573,212,600	89.48	100.00	150,237,500
5 2 2 03				19	Belanja Pelatihan (DAK NON FISIK)	7	Kali/Pihsn					714,050,000	714,050,000	563,812,500	78.96	100.00	150,237,500
5 2 2 15				02	Pejlanan Dinas Luar Daerah	1	Kegiatan					9,400,100	9,400,100	9,400,100	100.00	100.00	-
2 16 1 17 08				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata								-	-	-	-	-	
5 2 2 01				01	ATK Pembinaan Sader Wisata	33	Rim/Botol/Dos/Buah					-	-	-	-	-	
5 2 2 06				03	Belanja Cetak	1	Lembar					-	-	-	-	-	

NO. REKENING				Urusan/Program/Kegiatan				Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)	Konsultansi Pengawasan	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	
(1)				(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5 2 2 11				05	Belanja makan Minum	50	Orang						-	-	-	-	-	-			
5 2 2 15				01	Pejlanan Dinas Dalam Daerah	1	Kegiatan/ Kali						-	-	-	-	-	-			
5 2 2 29				01	Honorarium NaraSumber	1	Orang						-	-	-	-	-	-			
5 2 2 30				01	Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Sader Wisata	2	Orang						-	-	-	-	-	-			
Jumlah													10,799,081,810	10,799,081,810	7,244,983,521	91.06	99.76	3,554,498,289			

Parepare, 31 Desember 2020
Kepala Dinas,

YORRY R.I. LESAWENGEN AP
NP.19750725.199412.1.001

Tahun 2021

TARGET DAN REALISASI RENJA TAHUN 2021												
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
Organisasi		: 2.22.3-26.0-00.03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
Urusan Pemerintahan		: 2.22.3-26.0-00.03.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	
BELANJA												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,007,198,133	5,007,198,133	4,819,136,141	96.24	99.83	188,961,992
2 22	Kebudayaan						5,007,198,133	5,007,198,133	4,819,136,141	96.24	99.83	188,961,992
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						3,711,942,633	3,711,942,633	3,692,949,391	99.49	99.34	18,993,242
2 22 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22,145,346	22,145,346	21,412,946	96.69	100.00	732,400
2 22 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja & Forum SKPD)	2	Dokumen				15,384,100	15,384,100	14,912,200	97.06	100.00	451,900
2 22 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen				1,527,946	1,527,946	1,428,946	93.52	100.00	99,000
2 22 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen				1,986,000	1,986,000	1,821,000	91.69	100.00	165,000
2 22 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP)	1	Dokumen				-	-	-	-	-	-
2 22 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD dan SAKIP)	2	Dokumen				3,267,300	3,267,300	3,250,800	99.49	100.00	16,500
2 22 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,662,046,887	2,662,046,887	2,660,915,919	99.96	100.00	1,130,968
2 22 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan				2,633,235,887	2,633,235,887	2,632,467,919	99.97	100.00	767,968
2 22 01 2 02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Bulan				27,646,500	27,646,500	27,630,000	99.94	100.00	16,500
2 22 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen				1,164,500	1,164,500	818,000	70	100.00	346,500
2 22 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Dokumen				-	-	-	-	-	-
2 22 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-	-	-	-	-	-
2 22 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Anjab)	8	Org/Bulan				-	-	-	-	-	-
2 22 01 2 05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SOP)	8	Org/Bulan				-	-	-	-	-	-
NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	
2 22 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						262,453,400	262,453,400	261,468,864	99.62	100.00	984,536
2 22 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan				8,199,600	8,199,600	7,289,989	-	100.00	909,611
2 22 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	Unit				-	-	-	-	-	-
2 22 01 2 06 04	Penyediaan bahan logistik kantor (ATK)	5	Unit				34,098,500	34,098,500	34,093,500	99.99	100.00	5,000
2 22 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30	Unit				10,285,300	10,285,300	10,273,000	99.88	100.00	12,300
2 22 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	333	Lembar				16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00	-
2 22 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan				178,870,000	178,870,000	178,812,375	99.97	100.00	57,625
2 22 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	12	Bulan				15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	-
2 22 01 2 07	Pengadaan Barang Iik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14,585,000	14,585,000	14,585,000	100.00	95.99	19,510,256
2 22 01 2 07 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer dan Printer)	2	Unit				14,585,000	14,585,000	14,585,000	100.00	-	-
2 22 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						633,050,000	633,050,000	617,003,872	97.47	96.70	16,046,128
2 22 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan				720,000	720,000	720,000	100.00	100.00	-
2 22 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan				46,300,000	46,300,000	42,836,872	92.52	100.00	3,464,128
2 22 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan				10,000,000	10,000,000	9,993,000	99.93	100.00	7,000
2 22 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Upah PHT, Honor Tenaga Administrasi, dan ATK)	3	Kegiatan				576,030,000	576,030,000	563,455,000	97.82	96.80	12,575,000
2 22 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117,662,000	117,662,000	117,562,790	99.92	100.00	99,210
2 22 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan				48,219,000	48,219,000	48,174,943	99.91	100.00	44,057
2 22 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	Bulan				39,443,000	39,443,000	39,392,847	99.87	100.00	50,153
2 22 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan				3,000,000	3,000,000	2,995,000	99.83	100.00	5,000
2 22 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan				27,000,000	27,000,000	27,000,000	100	100.00	-

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	
2.22.02	KEBUDAYAAN						1,295,255,500	1,295,255,500	1,126,186,750			169,068,750
	Kebudayaan											
2.22.02.02	Program Pengembangan Kebudayaan						154,390,500	154,390,500	90,349,600	58.52	100.00	64,041,000
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam daerah Kabupaten/Kota						154,390,500	154,390,500	90,349,600	58.52	100.00	64,041,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		12 Bulan				154,390,500	154,390,500	90,349,600	58.52	100.00	64,041,000
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						540,865,000	540,865,000	540,365,000	99.91	100.00	500,000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						540,865,000	540,865,000	540,365,000	99.91	100.00	500,000
	Perindungan Cagar Budaya		1 Kegiatan				540,865,000	540,865,000	540,365,000	99.91	100.00	500,000
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman						600,000,000	600,000,000	495,472,250	82.58	100.00	104,527,750
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						600,000,000	600,000,000	495,472,250	82.58	100.00	104,527,750
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		1 Kegiatan				600,000,000	600,000,000	495,472,250	82.58	100.00	104,527,750

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8,005,414,392	8,005,414,392	7,962,431,017	98.93	98.90	42,983,375
3.26	Pariwisata						8,005,414,392	8,005,414,392	7,962,431,017	98.93	98.90	42,983,375
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						7,009,610,892	7,009,610,892	6,991,795,367	99.75	96.71	17,815,525
3.26.02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						606,325,500	606,325,500	604,691,100	99.73	98.71	1,634,400
3.26.02.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		1 Kegiatan				-	-	-	-	-	-
3.26.02.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Kegiatan				-	-	-	-	-	-
3.26.02.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Kegiatan				606,325,500	606,325,500	604,691,100	99.73	98.71	1,634,400
3.26.02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						6,403,285,392	6,403,285,392	6,387,104,267	99.75	96.52	16,181,125
3.26.02.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Kegiatan				6,403,285,392	6,403,285,392	6,387,104,267	99.75	96.52	16,181,125
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata						13,234,000	13,234,000	13,153,125	99.60	100.00	80,875
3.26.03.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri/ Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota						13,234,000	13,234,000	13,153,125	99.60	100.00	80,875
3.26.03.01.01	Penggiatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan				-	-	-	-	-	-
3.26.03.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan				3,014,000	3,014,000	3,014,000	100	100.00	-
3.26.03.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan				3,014,000	3,014,000	3,014,000	100	100.00	-
3.26.03.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		1 Kegiatan				10,220,000	10,220,000	10,139,125	99.21	100.00	80,875

NO. REKENING	Urusan/Program/Kegiatan	Vol	Satuan	Nomor Kontrak	Tanggal	Pelaksanaan	DPA	Nilai Kontrak	Realisasi			Sisa Kontrak (Rp)
									Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						982,569,500	982,569,500	957,482,525	97.45	100.00	25,086,975
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						982,569,500	982,569,500	957,482,525	97.45	100.00	25,086,975
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiraan Pariwisata		1 Kegiatan				119,991,500	119,991,500	119,878,125	99.91	100.00	113,375
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		1 Kegiatan				862,578,000	862,578,000	837,604,400	97.10	100.00	24,973,600
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata		1 Kegiatan				-	-	-	-	-	-
Akumulasi Realisasi Januari - Desember 2021							13,012,612,525	13,012,612,525	12,781,567,158	98.22	98.22	231,045,367

Rantepao, 31 Desember 2021

Kepala Dinas

YORR R LESAW ENGEN, AP, M.Tr, AP

NIP. 19630251994121001

Tahun 2022

2	22	05	2	02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			532,013,000	532,013,000	170,373,740	361,639,260	67.98	93.98		170,373,740				
2	22	05	2	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi dan diistarkan	40	Cagar	532,013,000	532,013,000	170,373,740	361,639,260	67.98	93.98	Objek/ Cagar	170,373,740	Tidak ada masalah		
Kebudayaan								710,000,000	710,000,000	221,569,800	488,430,200	68.79	100.00		221,569,800				
2	22	06	2	01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			710,000,000	710,000,000	221,569,800	488,430,200	68.79	100.00		221,569,800				
2	22	06	2	01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pembinaan dan peningkatan Mutu dan kapasitas SDM	1	Kejatan	10,000,000	10,000,000	277,200	9,722,800	97.23	100.00	1	Kejatan	277,200	tidak ada masalah
2	22	06	2	01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	jumlah event revitalisasi sarana dan prasarana Museum	1	keg	700,000,000	700,000,000	221,292,600	478,707,400	68.39	71.43	10	Kejatan	221,292,600	Masih disesuaikan teknis
3								2,394,912,427	2,394,912,427	593,136,563	1,801,775,864	108.71	126.68		593,136,563				
3								26	Pariwisata	2,394,912,427	2,394,912,427	593,136,563	1,801,775,864	108.71	126.68		593,136,563		
3								26	Pariwisata	1,001,518,500	1,001,518,500	498,369,500	503,149,000	50.24	50.24		498,369,500		
3								26	02	01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						485,511,500		
3	26	02	2	01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Daya Tarik Wisata	10	Lokasi	308,921,500	308,921,500	308,921,500	-	-	-	1	Lokasi	308,921,500	Tidak ada masalah
3	26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	10	Destinasi	469,597,000	469,597,000	176,387,000	293,210,000	62.44	62.44	7	Destinasi	176,387,000	Tidak ada masalah
3	26	02	2	01	04	Montoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	37	Laporan	3,000,000	3,000,000	203,000	2,797,000	93.23	93.23	7	Laporan	203,000	Tidak ada masalah
3	26	02	2	02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			150,000,000	150,000,000	12,858,000	137,142,000	91.41	91.43		12,858,000				
3	26	02	2	02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kawasan strategis Pariwisata yang diencanakan	3	Kawasan	150,000,000	150,000,000	12,858,000	137,142,000	91.43	91.43	1	Kawasan	12,858,000	Tidak ada masalah
3	26	02	2	03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	100.00		-	-	-	-	
3	26	02	2	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	20	Dokumen	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	100.00	100.00	1	Dokume	-	Tidak ada masalah

3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi DTW	20	DTW	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengurangan	
3								26	Pariwisata	121,684,927	121,684,927	54,365,063	67,379,864	179.07	179.02		54,365,063		
3								26	03	01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota								
3	26	03	2	01	01	Penggiatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan promosi melalui media cetak, Elektronik	2	Laporan	5,270,000	5,270,000	-	5,270,000	100.00	100.00	2	Laporan	-	Masih ada penyesuaian Nomenklatur belanja
3	26	03	2	01	02	Facilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan Fasilitas kegiatan pemasaran	7	Laporan	86,013,927	86,013,927	45,361,263	40,652,664	47.26	48.76	7	Laporan	45,361,263	Tidak ada masalah
3	26	03	2	01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen penyebaran informasi pariwisata	1	Dokumen	5,000,000	5,000,000	2,556,000	2,444,000	49.88	49.88	1	Dokume	2,556,000	Tidak ada masalah
3	26	03	2	01	04	Peningkatan kapasitas dan kemitraan pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri	peningkatan kapasitas/kemitraan pariwisata	4	Pameran	17,133,000	17,133,000	6,271,800	10,861,200	63.39	63.39	1	Pameran	6,271,800	Tidak ada masalah
3	26	03	2	01	05	Montoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Laporan Evaluasi pengembangan Pemasaran	15	Laporan	8,268,000	8,268,000	116,000	8,152,000	98.60	98.60	11	Laporan	116,000	Tidak ada masalah
3								26	Pariwisata	1,271,789,000	1,271,789,000	40,462,000	1,231,247,000	96.82	150.00		40,462,000		
3								26	05	01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3	26	05	2	01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta Masyarakat	8	Lokasi	320,000,000	320,000,000	34,604,800	285,395,200	89.19	100.00	8	Lokasi	34,604,800	Masih ada penyesuaian Nomenklatur belanja
3	26	05	2	01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Oras dan Pelajar (Mahasiswa dan Siswa Siswa)	Jumlah pelatihan Dasar SDM kepariwisataan	7	socialisasi/ Pelatihan	950,709,000	950,709,000	5,857,200	944,851,800	99.38	100.00	7	socialisasi/ Pelatihan	5,857,200	Tidak ada masalah
3	26	05	2	01	06	Facilitasi pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM Ekonomi kreatif	1	Kejatan	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	100.00	1	Kejatan	-	Tidak ada masalah
3								26	05	8,570,432,086	8,570,432,086	1,589,111,537	7,001,320,548	81.69	84.93		1,589,111,537		

Kes (Fisk (%)

Plantepao, 30 November 2022

Kepala Dinas,

MATIUS SAMPALONG, SE, M.Si

NIP.19720310 200212 1 006